



Analisis Evaluasi Pengembangan E-Government di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Ema Amalia ¹⁾; Evi Lorita ²⁾

¹⁾ Pemda Provinsi Bengkulu

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ Emaamalia4646@gmail.com; ²⁾ evilorita@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [28 Mei 2022]

Accepted [16 Juni 2022]

KEYWORDS

E-Government Development,
Website

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Evaluasi Pengembangan E-Government Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Pengembangan E-Government dalam rangka reformasi birokrasi berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bawa: (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan persiapan dalam pengembangan e-government yakni dengan membuat website dengan nama bengkuluprov.go.id yang merupakan salah satu portal website yang berfungsi sebagai sarana informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan melalui internet. (2) Pada tahap pematangan dalam pengembangan E-Government di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu telah melakukan dua hal yakni pembuatan situs informasi publik interaktif dan mudah untuk diakses, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain atau aplikasi yang secara tidak langsung terhubung/link dengan website yang dimiliki oleh lembaga lain di pemrov Bengkulu. (3) Website bengkuluprov.go.id merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bentuk sarana komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. (4) Website bengkuluprov.go.id merupakan aplikasi pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Sehingga fungsi pelayanan pemberian informasi secara Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

ABSTRACT

This study aims to determine the results of the Evaluation of E-Government Development at the Bengkulu Province Communication, Information and Statistics Office. The method used in this research is descriptive research with qualitative data analysis. The subject of this research is the Bengkulu Province Communication, Informatics and Statistics Office which has carried out E-Government Development in the context of bureaucratic reform based on Presidential Instruction No. 3 of 2003 at the Bengkulu Province Communication, Information and Statistics Office. Data collection techniques used include: Observation, Interview, and Documentation. The results of the study show that: (1) The Bengkulu Provincial Government has made preparations in the development of e-government, namely by creating a website with the name bengkuluprov.go.id which is one of the portal websites that functions as a means of information, communication and transactions between the public and the government. can be done via the internet. (2) At the maturation stage in the development of E-Government at the Bengkulu Province Communication, Informatics and Statistics Office, two things have been done, namely the creation of an interactive and easy-to-access public information site, and the creation of interfaces with other institutions or applications that are indirectly connected. / link with websites owned by other institutions in the Bengkulu provincial government. (3) The bengkuluprov.go.id website is an application developed by the Bengkulu Provincial Government as a form of communication and information facility in improving the quality of services to the people of Bengkulu Province. (4) The bengkuluprov.go.id website is a service application by the Bengkulu Provincial Government to the people of Bengkulu Province. So that the function of providing information services by Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), and Government to Citizen (G2C) can be carried out by the Bengkulu Provincial Government.

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi (TI). Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

2003 pemerintah menginstruksikan kepada beberapa pejabat lembaga pemerintahan termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah demi terlaksananya *e-government* secara nasional, merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut dan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dan melaksanakan instruksi dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu pemerintahan yang mendukung pelaksanaan *E-Government*, hal ini sesuai dengan Misi Provinsi Bengkulu yang ke 16 dan 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang mewajibkan seluruh Perangkat Daerah mengembangkan *E-Government* dalam mendukung penyelenggaraan layanan OPD berikut mekanisme asesmen dan penghargaan terhadap OPD dalam mengembangkan sistem *E-Government*.

Salah satu OPD yang telah merancang pemerintahan berbasis *E-Government* adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas pungli (pungutan liar). Untuk rancangan kawasan perkantoran terpadu tersebut dipusatkan di Jalan Pembangunan Kota Bengkulu, dengan Dinas Kominfo dan Statistik sebagai jantungnya dan beberapa OPD serta Badan di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, selaku awal konektivitas pemerintahan berbasis Informasi Teknologi (IT), (Usmin: <https://www.beritasatu.com/nasional>, 18 Februari 2019).

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan berbasis *E-Government*, Pemerintah Provinsi Bengkulu menerbitkan situs *website* resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai website induk dengan nama domain www.bengkuluprov.go.id dan website Perangkat Daerah sebagai sub domain. Website PD merupakan website resmi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Contohnya website yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu adalah www.diskominfotik.bengkuluprov.go.id. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pengelolaan website dibentuk Tim Pengelola Website PD yang terdiri dari Penanggung Jawab (1 orang), Redaktur (1 orang), Web Admin (1 orang), Web Developer (maksimal 3 orang) dan Pembuat Artikel (maksimal 5 orang).

Website Provinsi Bengkulu berisi tentang data-data dan keadaan umum Provinsi Bengkulu, seperti: sekilas Bengkulu, geografi, kependudukan, pariwisata, dan seni budaya. Selain itu, *website* ini juga menampilkan berita dan informasi tentang Pemerintahan Provinsi Bengkulu, seperti: perizinan, *e-planning*, info lelang, data statistik sektoral, OPD hingga tentang prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu.

LANDASAN TEORI

Penerapan dan pelaksanaan *E-Government* di lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu berdasarkan aturan-aturan pemerintah, yakni: (1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, (4) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, (5) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *E-Government* pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu, (6) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Master Plan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, (7) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi, (8) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Satu Data, (9) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan *Website* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, salah satu kunci keberhasilan terlaksananya pengembangan dan implementasi pelayanan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* akan sangat bergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang membangun system *e-government* yaitu infrastruktur perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang tersedia, infrastruktur aplikasi perangkat lunak yang akan dibangun atau yang telah digunakan, kompetensi SDM aparatur pendukung dan organisasi pengelola TIK.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengembangan E-Government khususnya dalam bidang TIK.



Berdasarkan hasil survey yg dilaksanakan oleh Tim Penyusun *Master Plan E-Government* Provinsi Bengkulu yang melibatkan 51 (lima puluh satu) OPD yang terdiri dari 41 OPD yang berada di lingkungan Provinsi Bengkulu dan 10 Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota, diketahui kondisi saat ini tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penerapan *E-Government* adalah: (1) Ditinjau dari aspek legalitas telah ada peraturan daerah atau pimpinan daerah yang tersurat mewajibkan setiap OPD untuk mengembangkan *E-Government* yaitu Pergub Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu; (2) Ditinjau dari sisi pengadaan dan pengembangan aplikasi system informasi khusus, salah satu OPD di Provinsi Bengkulu telah memiliki aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi OPD tersebut. Namun disisi lain terdapat sebagian besar OPD yang belum memiliki aplikasi yang dapat menunjang kegiatan maupun tugas pegawai; (3) Ditinjau dari kepemilikan situs web resmi, beberapa OPD yang terdapat di Provinsi Bengkulu, sudah memiliki subdomain sendiri untuk website resmi Provinsi Bengkulu. Keberadaan dari sub domain saat dilakukan verifikasi telah aktif dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam website resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengunjung diantaranya *Government Public Relation* (GPR) dan juga layanan elektronik E-Samsat dan Sipanse (Sistem Pelayanan Perijinan Secara Elektronik); (4) Ditinjau dari tingkatan proses pengembangan aplikasi *E-Government* berdasarkan sifat transaksi informasi yang dilayani, Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah memasuki tahap persiapan ditandai dengan telah dilakukan pengembangan situs resmi pemerintah provinsi sebagai sarana informasi publik yang saat ini dapat diakses di alamat <http://bengkuluprov.go.id>. Keberadaan situs ini masih perlu terus disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan manfaatnya. Saat ini fungsi dari website tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara kedepan website tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh OPD di Provinsi Bengkulu; (5) Ditinjau dari sisi pengadaan infrastruktur komunikasi data, infrastruktur yang ada saat ini masih belum memadai terutama jika nantinya setiap OPD diharapkan saling terkoneksi didalam suatu jaringan intranet maupun internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan pengamatan, saat ini jaringan computer dan akses internet masih terbatas di beberapa OPD saja. Keberadaan jaringan dan akses internet tampaknya juga belum begitu dimanfaatkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi fungsi penyelenggaraan pemerintah di setiap OPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa kelemahan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: (1) Terbatasnya SDM TIK yang terampil dan profesional; (2) Kurangnya kemampuan mengintegrasikan system informasi dan database OPD; (3) Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi masyarakat; (4) Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK; (5) Keterbatasan anggaran; (6) Kurangnya diklat pengembangan SDM; (7) Gangguan jaringan telekomunikasi; (8) Operator web yang belum terlatih; (9) Data yang belum terhimpun dan terkelola dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Subjek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Pengembangan *E-Government* dalam rangka reformasi birokrasi berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Government merupakan sebuah konsep pemerintahan secara elektronik yang mengandalkan sebuah sinergi antara Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*) dan Sumber Daya Manusia (*Humanware*) untuk memberikan 3 jenis pelayanan, yaitu: *Government to Government*, *Government to Business* dan, *Government to Citizen*.

Produk *E-Government* yang dikembangkan oleh pemerintah daerah beragam. Keberagaman ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa indikator, seperti: platform, target, pengguna, tujuan pembuatan, dan indikator lainnya. *Website* adalah salah satu produk *E-Government* sebagai media untuk meningkatkan minat dan kesempatan kepada masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik dan umpan balik dari masyarakat. Sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan efektif. Melalui website pemerintah dapat memberikan sejumlah informasi yang ditujukan

kepada masyarakat, bisnis, dan/atau kepada sesama instansi pemerintahan. Website adalah muara dari seluruh kekayaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai penunjang pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*, (Yunita dan Aprianto: 2018).

Peran teknologi secara khusus teknologi informasi semakin meningkat dan berdampak langsung terhadap tumbuh kembangnya suatu organisasi pemerintahan daerah. Model keselarasan strategis sebagai suatu kerangka konseptual didasarkan pada peranan teknologi informasi yang tidak sekadar mendukung organisasi/perusahaan secara administratif melainkan lebih pada peranan strategis. Hal ini dimaksudkan bahwa peranan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi proses bisnis organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah ada tetapi dapat menciptakan proses bisnis strategis yang baru. Suatu konsep strategis cenderung dinamis karena akan selalu ditiru oleh para kompetitor sehingga diperlukan proses adaptasi dan perubahan berkelanjutan terhadap konsep strategis yang tepat bagi organisasi pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, telah menetapkan 5 prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Kemiskinan dan Meretas Ketertinggalan
2. Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi
3. Pengembangan Infrastruktur Strategi dan Industrialisasi
4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
5. Visit *Wonderful* Bengkulu

Salah satu dari 5 prioritas tersebut khususnya pada point 4 adalah:

1. Peningkatan kualitas indeks kepuasan masyarakat dalam perizinan
2. Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi kompetensi
3. Penerapan *E-Government*
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pada point tiga penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu telah melakukan pengembangan *E-Government* sebagai sarana komunikasi, informasi dan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengembangan *E-Government* tersebut berdasarkan indikator penataan *E-Government* sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tersebut, maka diperoleh indikator penelitian yang terdiri dari empat aspek yakni: (1) Tahap pertama (Persiapan), (2) Tahap kedua (Pematangan), (3) Tahap ke tiga (Pemantapan), dan (4) Tahap ke empat (Pemanfaatan).

1. Tahap pertama (Persiapan) dalam Pengembangan *E-Government* Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Pengembangan *E-Government* di lingkungan instansi pemerintah sejatinya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang. Persiapan yang harus dilakukan merupakan tahap pertama dalam pengembangan *E-Government*. Persiapan dan perencanaan dalam pengembangan *E-Government* yang dimaksud adalah adanya pembuatan *situs web* sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga, serta melakukan sosialisaisitus web untuk internal dan publik (masyarakat).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tahap persiapan *E-Government* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu telah membuat *website* dengan nama *bengkuluprov.go.id* yang merupakan salah satu portal *website* yang berfungsi sebagai sarana informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan melalui internet.

Pengembangan *E-Government* oleh Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu berdasarkan aturan dan kebijakan yang ada. Kebijakan tersebut didokumentasikan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu yakni Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bengkulu mengeluarkan kebijakan dalam rangka pengembangan *E-Government* yakni SK Kepala Dinas Kominfotik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Penunjukkan Tim Pengelola *Website* Kegiatan Optimalisasi Domain dan Subdomain *bengkuluprov.go.id*. Dalam kebijakan ini berisi tentang Penunjukkan Tim Pengelola *Website* Kegiatan Optimalisasi Domain dan Subdomain *Bengkuluprov.go.id*. Tim Pengelola *Website* terdiri dari: Penanggung jawab, Redaktur, Editor, *Web*



Admin (JFT Pranata Humas) bertugas: mengatur tata letak *website*, *Web Developer* bertugas mengembangkan *website*.

Tugas Tim Pengelola *Website* antara lain:

- Bertanggungjawab terhadap optimalisasi domain dan subdomain bengkuluprov.go.id di lingkungan Provinsi Bengkulu;
- Pemantauan pemberitaan dan konten yang ada di *website* bengkuluprov.go.id;
- Pengumpulan data dan mengelola data *website* bengkuluprov.go.id;
- Koordinasi dengan media center untuk update berita *website* bengkuluprov.go.id.

Tim khusus pengelola *website* tersebut bertanggungjawab dalam pengelolaan *website*, pemantauan, pengumpulan data dan koordinasi. Selain pembentukan tim khusus tersebut, pemerintah provinsi Bengkulu juga sudah melakukan sosialisasi pengembangan *E-Government* di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui forum rapat lembaga pemerintahan Provinsi Bengkulu dan internal Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu.

2. Tahap kedua (Pematangan) dalam Pengembangan *E-Government* Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Salah satu manfaat pengembangan *E-Government* adalah pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahap pematangan *E-Government* di lingkungan pemerintah hendaknya sudah melakukan pengembangan *E-Government* di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi. Bentuk pengembangan ini berupa pembuatan *situs web* informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarketerhubungan dengan lembaga lain.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika merupakan bentuk pelaksanaan *E-Government* dalam rangka mendukung proses birokrasi. Pengembangan *E-Government* dilakukan dengan membuat *website* yang dapat diakses oleh masyarakat Provinsi Bengkulu yakni bengkuluprov.go.id dan diskominfotik.bengkuluprov.id. *Website* bengkuluprov.go.id berisi menu layanan tentang: Berita, Perijinan dan Investasi, Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPP) E-Planning, Pengandaan Barang dan Jasa (LPSE), Produk Hukum (JDIH), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Publikasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD), Publikasi Pengelolaan Keuangan, Perangkat Daerah, Info Grafis, Laporan!!!, dan Cuaca hari ini.

Pembuatan *website* tersebut dengan menu layanan yang bervariasi seperti di atas dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, sehingga tiap-tiap instansi yang terlibat berhubungan langsung dengan tim pengelola *website* dalam memberikan informasi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.

3. Tahap ke Tiga (Pemantapan) dalam Pengembangan *E-Government* Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Yang dimaksud dengan pemantapan dalam *E-Government* adalah sudah dilakukannya pengembangan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembuatan interoperabilitas aplikasi dan datadengan lembaga lain.

Tahapan pemantapan dikategorikan untuk *website* yang menyediakan satu layanan elektronik berupa *website* atau aplikasi untuk layanan publik. *Website* atau aplikasi yang dimaksud dapat berupa formulir pendaftaran ujin online, yang dapat memperpendek prosedur ijin. Yang menarik adalah bahwa aplikasi pengaduan masyarakat (salah satu indikator tahap pemantapan) sudah disediakan oleh sebagian besar *website* yang masuk dalam tahapan ini, (Yunita dan Aprianto: 2018).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengembangan *e-government* pada Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu dapat diketahui bahwa tahap ketiga (pemantapan) sudah dilakukan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. *Website* bengkuluprov.go.id merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bentuk sarana komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Artinya adanya *website* ini membantu pelaksanaan *E-Government* di Provinsi Bengkulu. *Website* ini juga sudah terkoneksi/terhubung dengan lembaga atau instansi yang terkait didalamnya.

Akan tetapi diketahui juga bahwa pengembangan *e-government* di lingkungan Dinas Kominfotik masih terdapat berbagai kendala, seperti:

- SDM terbatas khususnya untuk *web developer*
- Belum adanya SOP publikasi berita
- Belum ada honorinya untuk pengelola *website* dinas
- Ruang belum memadai

e. Meubeler terbatas, hanya ada 2 PC dan 2 Laptop

Kendala seperti di atas akan berdampak pada kurang maksimalnya penerapan *e-government* di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.

4. Tahap Ke Empat (Pemanfaatan) dalam Pengembangan *E-Government* Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

Tahap pemanfaatan dalam pengembangan *E-Government* di lingkungan instansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional: Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Citizens/consumers* (G2C).

Kategori paling tinggi dalam model 4 tahapan adalah pemanfaatan. Website dikategorikan kedalam tahapan ini jika memiliki aplikasi yang menekankan pada integrasi layanan G2G, G2B, dan G2C, (Yunita dan Aprianto: 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika sudah melakukan pengembangan *E-Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional. Dimana *website bengkuluprov.go.id* merupakan aplikasi pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Dengan adanya *website*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan melalui internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi disediakan 24 jam sehari. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pelayanan pemberian informasi secara *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Citizen* (G2C).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan tentang Evaluasi *E-Government* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan persiapan dalam pengembangan *e-government* yakni dengan membuat *website* dengan nama *bengkuluprov.go.id* yang merupakan salah satu portal *website* yang berfungsi sebagai sarana informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan melalui internet. Website tersebut dibuat berdasarkan aturan dan kebijakan yang ada. Pada tahap persiapan ini pemprov Bengkulu telah membuat situs informasi di setiap lembaga, menyediakan dan menyiapkan SDM yang handal sesuai bidangnya, selanjutnya pemprov Bengkulu juga telah menyiapkan sarana infrastruktur dengan menyediakan jaringan/aplksi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat provinsi Bengkulu, dan terakhir pemprov Bengkulu juga telah melakukan sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik melalui berbagai media cetak maupun televisi.
2. Pada tahap pematangan dalam pengembangan *E-Government* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu telah melakukan dua hal yakni pembuatan situs informasi publik interaktif dan mudah untuk diakses, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain atau aplikasi yang secara tidak langsung terhubung/link dengan website yang dimiliki oleh lembaga lain di pemprov Bengkulu.
3. *Website bengkuluprov.go.id* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bentuk sarana komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. *Website* ini juga sudah terkoneksi/terhubung dengan lembaga atau instansi yang terkait didalamnya. Akan tetapi aplikasi transaksi yang terdapat pada website pemprov Bengkulu masih bersifat transaksi informasi dan data, belum pada transaksi keuangan. Sedangkan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data antar lembaga lain masih dalam tahap persiapan.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bengkulu sudah melakukan pengembangan *E-Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional. Dimana *website bengkuluprov.go.id* merupakan aplikasi pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Sehingga fungsi pelayanan pemberian informasi secara *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Citizen* (G2C) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.



Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas, khususnya yang terkait dengan pengembangan *E-Government* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, maka saran yang dirasakan perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan SDM yang handal dalam bidang teknologi informatika, sehingga dapat mengelola website dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Selain itu hendaknya pemerintah dapat menyediakan insentif dan sarana prasarana yang memadai bagi tim pengelola website.
2. Melakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan *E-Government*, kemudian mensosialisasikan ulang melalui diklat, kursus, dan workshop kepada penyelenggara situs web daerah supaya pelaksanaan *E-Government* di Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih optimal.
3. Memberikan informasi terkait aktivitas/kebijakan kepada publik melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah perlu ditingkatkan lagi dalam proses pencapaian pelaksanaan penerapan sistem *E-Government*. Bagi Pemerintah/Instansi sendiri maka disarankan untuk lebih transparan kepada masyarakat terkait aktivitas/kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cara menerbitkan di surat kabar ataupun media lokal lainnya mengenai perkembangan pelaksanaan pemerintah di Provinsi Bengkulu, kemudian *update website* Pemerintah setiap tahunnya supaya perkembangan terakhir tentang Pemerintah Daerah diketahui masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Atmosudirjo, S., Prajudi. 2000. *Administrasi Manajemen Umum*. Jakarta: CV. Mas Haji.
- Dwiyanto, Agus et. al. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- HR. ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Inpres RI No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Hasanuddin. Vol. VII. No. 2, September 2006.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lorita, Evi. 2015. Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Professional jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. Vol. 5, No. 1. Vol. 2, No. 2 (2015).
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *road map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Rianto, Budi. 2002. *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Robbins, Stephen. P. 2004. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Robbins, Stephen. P. 2004. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Santoso, Priyo Budi. 2003. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sarundajang, S.H. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Syafi'i, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

- Toding Rante A., Lorita, Eko Saputra H. 2018. Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Bengkulu (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu). Professional jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik. Vol. 5, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yunita, Novi Prima dan Aprianto, Rudi Dwi. 2018. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi informasi dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018). Yogyakarta, 23-24 Maret 2018.